

## DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) TERHADAP EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN

Andar Almira Akilah Diba<sup>1</sup>, Fadla Nilan<sup>2</sup>, Fauzan Akmal Muzakki<sup>3</sup>, Khanza Kineta Amany<sup>4</sup>,  
Siti Komariah<sup>5</sup>

[almeeraakell@upi.edu](mailto:almeeraakell@upi.edu)<sup>1</sup>, [fadlanilan@upi.edu](mailto:fadlanilan@upi.edu)<sup>2</sup>, [2krupiah@gmail.com](mailto:2krupiah@gmail.com)<sup>3</sup>, [khanzakineta@upi.edu](mailto:khanzakineta@upi.edu)<sup>4</sup>,  
[sitikomariah@upi.edu](mailto:sitikomariah@upi.edu)<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRACT

*The development of the Capital City of the Archipelago (IKN) is triggered by the need for equitable development in Indonesia and is planned to be a special area as the center of government and green innovation. IKN is located between Kutai Kertanegara Regency and Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan. This study aims to analyze the impact of IKN (Capital City of the Archipelago) development on the surrounding economy, social and environment. This study uses a literature study method with journal data related to the topic of discussion, published, and selected in the period starting from 2018 to 2023. The stages of the literature study carried out, namely listing the study variables, determining the source of information, selecting the description of the required materials, conducting a keyword search. The results of the literature study are used as reference material so as to provide an overview of the positive impacts and negative impacts of the IKN development, both those that have occurred and are still a potential that can occur. Based on the literature study, the relocation of IKN has both positive and negative impacts on several aspects: 1) Economic aspects, namely the potential for economic growth (positive) and the potential for additional inflation (negative), 2) social aspects, namely acculturation (positive) and inculturation (negative), and 3) the environment, namely the loss of natural habitat. Any potential negative impacts from the relocation of IKN can be prevented by finalizing the most effective planning and new solutions.*

**Keywords:** *IKN, Economic, Social, Environment*

### ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipicu oleh kebutuhan pemerataan pembangunan di Indonesia dan direncanakan akan menjadi daerah yang bersifat khusus sebagai pusat pemerintahan dan inovasi hijau. IKN terletak di antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan IKN terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitarnya. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan data jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan, terbit, dan dipilih dalam kurun waktu mulai dari tahun 2018 sampai 2023. Tahapan studi literatur yang dilakukan, yaitu mendaftar variabel kajian, menentukan sumber informasi, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan, melakukan pencarian kata kunci. Hasil studi literatur digunakan sebagai bahan rujukan sehingga memberikan gambaran terkait dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan IKN, baik yang sudah terjadi maupun masih menjadi potensi yang dapat terjadi. Berdasarkan studi literatur, pemindahan IKN memberikan dampak positif maupun negatif terhadap beberapa aspek: 1) Aspek ekonomi, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi (positif) dan potensi penambahan inflasi (negatif), 2) aspek sosial, yaitu akulturasi (positif) dan inkulturasi (negatif), dan 3) lingkungan, yaitu hilangnya habitat alami. Setiap potensi timbulnya dampak negatif dari pemindahan IKN dapat dicegah dengan mematangkan perencanaan maupun solusi baru yang paling efektif.

**Kata Kunci:** *IKN, Ekonomi, Sosial, Lingkungan*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipicu oleh kebutuhan pemerataan pembangunan di Indonesia. Secara ekonomi, 58% Produk Domestik Bruto (PDB) dan 56% populasi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, membuat kalangan elit politik percaya bahwa pemindahan ibu kota dapat membantu menghilangkan jawasentrisme dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ibu kota ini direncanakan akan menjadi daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan inovasi hijau.

IKN terletak di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena aksesibilitas yang tinggi, kependudukan yang heterogen dengan potensi konflik rendah, serta dukungan pertahanan tri matra (darat, laut, udara). Mengingat Kembali dengan kondisi Jakarta saat ini yaitu menjadi pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa, serta memiliki bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Beban ini telah membuat Jakarta semakin padat dan rusak, dengan kemacetan lalu lintas yang parah dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani. Tidak hanya itu, kondisi pulau Jawa pun berkontribusi dalam pembangunan IKN yaitu Pulau Jawa telah menjadi tempat tinggal 150 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia, serta 58% PDB ekonomi Indonesia. Beban ini akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan tetap di Pulau Jawa.

Pembangunan IKN bertujuan untuk mendukung visi Indonesia 2045 dengan memberikan dukungan dan dorongan bagi transformasi ekonomi yang adil dan merata. IKN juga diharapkan dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang belum terjamah sebelumnya, seperti Kalimantan Timur. Pemerintah juga berusaha untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan.

Namun, pembangunan Ibu Kota Negara

(IKN) di Kalimantan Timur membawa dampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pertama, dampak terhadap lingkungan mencakup deforestasi, pencemaran, dan penurunan kualitas ekosistem. Menurut data, sekitar 58,50% dari wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang berpotensi mengalami kerusakan akibat pembangunan infrastruktur. Kedua, dampak social perubahan struktur sosial dan potensi konflik. Masyarakat sering kali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketimpangan. Ketiga, aspek ekonomi juga terpengaruh; meskipun ada peluang kerja baru, ketidakmerataan distribusi manfaat pembangunan sering kali terjadi. Data menunjukkan bahwa 70% penduduk lokal belum merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari proyek ini. Dengan menganalisis ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan IKN.

Setiap negara perlu memiliki Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat administrasi negara. Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia memiliki satu Ibu Kota Negara. Jakarta telah ditetapkan sebagai IKN melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta (Hutasoit, 2019).

Akibatnya, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang membuatnya menjadi tempat tujuan penduduk Indonesia dari berbagai pulau untuk merantau dan mencari nafkah. Penduduk Jakarta melonjak sangat pesat setelah ditentukan menjadi IKN akibat kebutuhan tenaga kerja (Raniasati et al., 2023). Pemerintah lalu membangun infrastruktur secara besar-besaran dari mulai area pemukiman ke area bisnis dan perkantoran untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk.

Hal ini berdampak kepada wilayah Jakarta secara signifikan dari aspek geografi

ke aspek sosial. Dampak yang terjadi diantaranya pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah industri maupun rumah tangga yang mengakibatkan banjir yang diakibatkan oleh sampah. Banjir yang terjadi di Jakarta pula disebabkan oleh menurunnya ketinggian tanah akibat pengambilan air tanah dengan jumlah banyak untuk memasok kebutuhan rakyat Jakarta. (Colven, 2020).

Di awal tahun 2022, pemerintah dan parlemen menyepakati dan menyetujui landasan hukum untuk menetapkan pemindahan IKN. Setelah melewati banyak proses, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), akhirnya secara resmi menjadi landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara (Parlementaria DPR RI, 2020 dalam Pusat Riset Politik, 2022).

Banyak faktor yang memengaruhi pertimbangan pemindahan IKN, antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan potensi bencana alam yang ada di Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa juga berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan kondisi ekonomi yang tidak merata di Indonesia. Hal-hal ini yang menjadi argumen untuk memindahkan IKN ke wilayah yang berada di luar Pulau Jawa (FISIP UI, 2020).

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), rencana pemindahan IKN disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur.
2. Pulau Jawa rawan akan bencana gempa bumi.
3. Lalu lintas di Jakarta macet, penuh, sesak, dan kumuh.
4. Masalah rawan banjir yang disebabkan banjir dari hulu, penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta dan naiknya air laut.
5. Kualitas air sungai tercemar berat dan ketersediaan air bersih. Sekitar 96% kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat dan mengancam kehidupan rakyat. Ibu kota yang dibutuhkan mencerminkan identitas bangsa, modern, dan berkelas internasional (Pratami, 2020).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon IKN. Wilayah Kalimantan sudah dipandang sebagai kawasan ideal bagi penempatan wilayah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Kalimantan memiliki wilayah yang luas, lebih aman dari potensi gempa bumi daripada Jawa, juga dianggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia (Shalih et al., 2018).

## B. METODE

Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jurnal, artikel, buku, dan *website* resmi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Tahapan studi literatur yang dilakukan pada kajian ini, yaitu mendaftar variabel yang perlu dikaji, menentukan sumber informasi yang akan diperiksa, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber yang tersedia, dan melakukan pencarian kata kunci. Hasil studi literatur digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan kajian serta untuk mengungkap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini, Jakarta masih menjadi kota yang mendominasi perputaran ekonomi di negara Indonesia. Beberapa pihak mengatakan bahwa dengan adanya perpindahan IKN, maka perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih merata dan tidak hanya berpusat di pulau Jawa. Perpindahan IKN juga berpengaruh pada inflasi yang ada di Indonesia, namun karena proyek perpindahan IKN ini dilakukan secara bertahap, mungkin dampaknya tidak akan terlihat signifikan. Dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tahapan perencanaan yang akan dilakukan. Apabila perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan yang benar-benar matang,

maka efek yang ditimbulkan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diperkirakan akan tumbuh dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Dalam kajian yang telah dilakukan, pemindahan ibu kota mampu meningkatkan perekonomian 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru (Hasibuan, 2019). Apabila pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di pulau Jawa, maka dapat menyebabkan adanya disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat.

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37% (Bappenas, 26 juni 2019). Perpindahan pusat pemerintah ke Kalimantan akan berkontribusi banyak terhadap perkembangan ekonomi di pulau Kalimantan khususnya provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Selain itu, bisa mengembangkan perdagangan antardaerah, terutama perdagangan antara pulau Jawa serta Kalimantan, sehingga terbentuk nilai ekonomi yang lebih maju.

Pemindahan ibu kota akan menimbulkan tambahan inflasi nasional minimal 0,3% meskipun nantinya tekanan dari sisi permintaan akan meningkat. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya. Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mengembangkan perdagangan antardaerah di Indonesia. Lebih dari 50% daerah Indonesia akan merasakan kenaikan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah. Selain itu, perpindahan ibu kota akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada daerah lain dan dapat meningkatkan output (Giating Khoiriamal et al., 2022).

Selain potensi ekonomi, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh

pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN. Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 triliun dan Rp323 triliun. Proyek pembangunan 'kota baru' menuntut penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur memiliki risiko jangka panjang terutama berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

Peristiwa pemindahan ibu kota negara sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara dengan macam-macam alasan yang berbeda. Berikut beberapa contohnya yaitu pertama, Brasilia yang sekarang ibu kotanya terletak di pedalaman dikarenakan ibu kota yang lama sudah terlalu padat, yang kedua yaitu Korea Selatan yang memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong. Indonesia juga memiliki banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlu atau tidaknya Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya. Antara lain ada faktor sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta faktor lingkungan.

Dampak pemindahan ibu kota negara dalam bidang sosial ini dapat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila pusat pemerintahan serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalam ibu kota sebelumnya melakukan perpindahan atau migrasi, hal ini tentu akan menimbulkan hal yang bernama *social effect* atau efek sosial bagi masyarakat yang tinggal di Ibu Kota Lama maupun yang tinggal di Ibu Kota Baru. Pemindahan masyarakat tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan akulturasi budaya ataupun inkulturasi budaya.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019. Jokowi menyatakan bahwa akan ada relokasi atau pemindahan ibu kota yang semula bertempat di DKI Jakarta menjadi di Kalimantan Timur. Di dalam pengumuman tersebut, Presiden RI menyebutkan salah

satu alasan pemindahan adalah bahwa populasi di Jakarta sudah melebihi kapasitasnya. Kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas, akan menyebabkan adanya kerusakan lingkungan, demikian pula dengan di Ibukota DKI Jakarta.

Tentu banyak dampak lingkungan yang akan timbul karena pemindahan IKN ini, salah satunya yaitu hilangnya habitat. Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menyebabkan hilangnya habitat alami, terutama apabila terjadi penebangan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini berpotensi mengancam keanekaragaman hayati yang ada pada lingkungan tersebut. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga dapat menyebabkan adanya polusi pada lingkungan. Seperti pada saat membangun jalan dan gedung, hal ini tentu saja akan menyebabkan polusi udara dan kebisingan. Akhirnya, kesehatan dan kualitas hidup masyarakatlah yang terkena dampaknya.

Pemindahan ibu kota negara ini juga berdampak mendorong migrasi penduduk ke wilayah ibu kota yang baru, yaitu Kalimantan timur. Hal ini dapat mempercepat urbanisasi dan memberikan tekanan pada infrastruktur serta layanan publik lokal. Dampak lain dari pemindahan ibu kota negara yaitu bisa menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan penduduk pendatang. Tekanan pada sumber daya lokal dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan ekonomi.

#### D. KESIMPULAN

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara tentunya memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap beberapa aspek di sekitarnya. Dari segi ekonomi, IKN dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun apabila perencanaan yang dilakukan benar-benar perencanaan matang. Namun, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh pemerintah, yaitu terkait pembiayaan dan karakteristik infrastruktur yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Selain itu, pemindahan IKN juga dapat berdampak pada aspek sosial. Potensi

terjadinya migrasi yang besar juga dapat berpotensi terhadap akulturasi maupun inkulturasi budaya.

Salah satu alasan pemindahan ibu kota negara adalah bahwa populasi di Jakarta sudah melebihi kapasitas sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan. Namun, hal ini justru dapat menyebabkan hilangnya habitat alami di Kalimantan, khususnya apabila terjadi penebangan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan setiap potensi timbulnya dampak negatif dari pemindahan IKN dapat dicegah dengan mematangkan perencanaan-perencanaan yang ada maupun dengan memperhitungkan solusi pencegahan yang paling efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H., & Santoso, D. (2021). Dampak lingkungan pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan dari aspek ekologis dan sosial. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 12(3), 123-135.
- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-18.
- Budi, S., & Kurniawan, M. (2023). Potensi dan risiko lingkungan dalam pemindahan Ibu Kota. Negara. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 14(1), 99-112.
- Colven, E. (2020). Subterranean infrastructures in a sinking city: the politics of visibility in Jakarta. *Critical Asian Studies*, 52(3), 311-331.
- FISIP UI. 27 Februari 2020. Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Hukum, Budaya, 2019, 39(2), 108-128.

- Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara”, doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 4.
- Mazda, C. N. (2022). Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.
- Raniasati, R., Ngaisah, Z. F. N., Adinugraha, H. H., & Nasarruddin, R. Bin. (2023). Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid. *Aqlania*, 13(2).
- S. Amila, A. A. Nugraha, A. Sukron, & F. Rohmah. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 10–18.
- Shalih, O., Toun, N. R., Kebencanaan, B. T., Aprinae, O., Ito, Y., Faculty, I. S., Komiya, K., Kotani, Y., Supriyatno, M., & Yahya, M. (2018). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- W. L. Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibukota Negara”, dedikasi: *Jurnal Ilmiah Sosial*,
- Widodo, S. (2023). Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemindahan IKN: Analisis lingkungan dan kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(4), 201-215.
- Y. H. Pratami, “Tanggung jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan”.